

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI - MISI RPJPD

5.1.1 VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 ,berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu “ **Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025**” adalah sebagai berikut:

*”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN
TAQWA”*

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

- **Mandiri** dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi ‘*Maju*’, adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.
- **Maju dimaksudkan** sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumberdaya manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan.

- **Sejahtera** dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (*civil society*). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas; terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi; kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastruktur yang tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah diseluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu "*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera*" serta "*Iman dan Taqwa*". Kalimat "*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera*" adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten. Adapun "*Iman dan Taqwa*" merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Selain itu, Provinsi Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai visi yang mendukung Visi Nasional yaitu "*Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*" serta menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Banten akan "*satu arah, satu langkah, dan satu tujuan*" menuju Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.

5.1.2 MISI

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-

2025 sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun **Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025** yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tabel 5.1
Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional

RPJP NASIONAL 2005 -2025	RPJPD PROVINSI BANTEN 2005 -2025
VISI INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	VISI BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA
MISI	MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia,internasional	
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	

Keterpaduan pembangunan secara nasional, maka misi pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten untuk turut mendukung pewujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, sebagai matrik telaah, oleh karena itu, keselarasan dan keterkaitan misi pembangunan Provinsi Banten dengan misi pembangunan nasional serta Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menjadi satu hal yang penting adanya.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan derap langkah mewujudkan visi pembangunan 2005-2025. Khususnya menjadi pedoman baik bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun RPJPD, maupun bagi kepala daerah (gubernur) dalam menyusun visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran misi 1. *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas* adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya		
		1.1.	Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat
2.	Meningkatkan taraf pendidikan dan minat baca masyarakat		
		2.1.	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan daya saing taraf pendidikan masyarakat
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
		3.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
4.	Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial		
		4.1.	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
		4.2.	Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
5.	Meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja		
		5.1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha
		5.2.	Menurunnya tingkat pengangguran
		5.3.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		5.4.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Tujuan		Sasaran	
6.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran		
		6.1.	Meningkatnya kesejahteraan hidup dan terbangunnya kemandirian transmigran
7.	Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa		
		7.1.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		7.2.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa
8.	Mengendalikan perkembangan penduduk		
		8.1.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk
9.	Meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan		
		9.1.	Meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan
		9.2.	Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga

Tujuan dan sasaran misi 2. ***Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan*** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian		
		1.1.	Meningkatnya investasi daerah
		1.2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
		1.3.	Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat perkotaan dan perdesaan
2.	Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar		
		2.1.	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
		2.2.	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri
		2.3.	Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan
		2.4.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata

Tujuan		Sasaran	
		2.5.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan
3.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat		
		3.1.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
4.	Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional		
		4.1.	Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar wilayah		
		5.1.	Meningkatnya pelayanan sistem transportasi
		5.2.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
		5.3.	Meningkatnya pelayanan drainase
		5.4.	Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir
		5.5.	Meningkatnya pelayanan air bersih
		5.6.	Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah
		5.7.	Meningkatnya pelayanan energi dan listrik
		5.8.	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika
6.	Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman		
		6.1.	Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau
		6.2.	Berkurangnya kawasan kumuh

Tujuan dan sasaran misi 3. ***Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari*** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan kualitas penataan ruang		
		1.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah.

Tujuan		Sasaran	
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam		
		2.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
		3.1.	Terjaganya daya dukung lingkungan hidup
		3.2.	Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4.	Mitigasi dampak bencana	4.1.	Berkurangnya korban jiwa, kerugian moril, dan kerugian materil akibat bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri

Tujuan dan sasaran misi 4. ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
		1.1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK
		1.2.	Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
		2.1.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat
3.	Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah		
		3.1.	Meningkatnya pendapatan daerah
		3.2.	Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah
		3.3.	Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah
		3.4.	Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan		
		4.1.	Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan

Tujuan		Sasaran	
5.	Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat		
		5.1.	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum
6.	Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi	6.1.	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat
7.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		
		7.1.	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam mewujudkan percepatan pembangunan harus mengacu kepada Skala **Prioritas** pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dalam dokumen RPJPD tersebut Skala Prioritas RPJMD Ke-4 (2018-2022) telah di sinkronkan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu :

1. **Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-3 **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Indeks Gini, Kemiskinan, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Daya Beli, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke- 3 **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas dengan** target capaian indikator kinerja daerah yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Misi ke-4 **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
3. **Peningkatan Daya Saing Perekonomian** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-5 **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi** yang diakselerasi

oleh program **prioritas** sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Inflasi, LPE Sektor Unggulan, Indeks Keuangan Inklusif, Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan dengan provinsi lain.

4. **Peningkatan Daya Saing Pelayanan Prasarana dan Sarana** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-2 **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah, dan Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur.
5. **Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-5 **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu, LPE Sektor Unggulan, Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan dengan provinsi lain dan Emisi Rumah Kaca dan Misi ke-2 **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-1 **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP (sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah).
7. **Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-2 **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu

Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah, dan Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur.

5.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

Kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030 telah mengakselerasikan dengan kebijakan umum nasional yang terbaru diterbitkan yaitu : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Akselerasi juga dilakukan untuk kebijakan nasional yang didalamnya mengatur penetapan tata ruang proyek strategis nasional di Provinsi Banten, yaitu : Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTRW Pulau Jawa Bali. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Pedarcepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Industri Semen di Bayah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung.

5.3.1 Tujuan Penataan Ruang

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, tujuan *penataan ruang wilayah provinsi Banten andalah adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata*. Untuk itu penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 mengacu pada perwujudan tersebut di atas.

5.4 VISI DAN MISI RPJMD

Visi dan Misi RPJMD merujuk pada kerangka pemahaman Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN tahun 2005-2025) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Provinsi Banten) 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal yang menjunjung tinggi konsep iman dan Taqwa dalam implementasinya Akhlaqul karimah maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing, sehingga dirumuskan

dalam Visi, yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu:

VISI :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAQHILAQUL KARIMAH.

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan Kabupaten/Kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan,

pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang Akhlakul Karimah berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada perilaku aparaturnya pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, dan penurunan indeks persepsi korupsi di Provinsi Banten.

MISI

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

PRIORITAS UNGGULAN

A. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

1. Penerapan E-Planning, E-money, dan E-Budgeting;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
4. Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari Disclaimer/WDP ke WTP);
5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;

6. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
7. Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

B. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur

1. Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak;
2. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;
3. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan Provinsi;
4. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
5. Normalisasi Sungai dari seluruh sungai yang ada di Banten;
6. Normalisasi Situ untuk pengembalian fungsi Situ;
7. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;
8. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;
9. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan lokal;
10. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;
11. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
12. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;
13. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan dan Irigasi).

C. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK;
2. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 SMA, SMK;

3. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 Guru SMA, SMK;
4. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK;
5. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;
6. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama serta membentuk karakter yang Berakhlaqul Karimah.

D. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;
2. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.

E. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
2. Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;

Dalam menjalankan visi, misi dan program ini, juga melaksanakan amanat undang-undang yang berbasis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Tabel 5.2

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Banten (Sebelum Perubahan)

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat		2,8	3.1	3.2	-	-	-	-
1.1			Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	CC	B	BB	-	-	-	-
1.2			Pelayanan Publik Yang berkualitas	Capaian Pelayanan Publik	100	100	100	-	-	-	-
1.3			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	100	100	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1.4			Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-
1.5			Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Capaian Maturitas SPIP	2,00	2	3	-	-	-	-
1.6			Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	20,00	42.1	61.83	-	-	-	-
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,08	88.08	89	-	-	-	-
1.7			Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	60,00	65	70	-	-	-	-
1.8			Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	50	100	100	-	-	-	-
1.9			Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	10	10	15	-	-	-	-
1.1			Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	10	10	15	-	-	-	-
1.11			Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio terhadap pendapatan daerah (%)	62.89	59.3	60.62	-	-	-	-
1.12			Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	70,00	75	75	-	-	-	-
1.13			Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	68,46	70	74	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
			kondusif untuk mendukung NKRI								
				Angka Kriminalitas	5.002,00	4800	4500	-	-	-	-
1.14			Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	133,00	133	125	-	-	-	-
1.15			Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	50	80	80	-	-	-	-
2	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah		50	100	100	-	-	-	-
2.1			Infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas	Tingkat Kemantapan Jalan	78,98	87.43	89	-	-	-	-
2.2			Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta Ketersediaan Air Baku	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	15,51	20.89	26.27	-	-	-	-
				Pemenuhan tingkat layanan irigasi	15.118,50	15332.98	16721.78	-	-	-	-
2.3			Perencanaan dan Penataan ruang yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	80	82.5	85	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4			Tersedianya Perumahan dan Pemukiman yang layak. Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh	375.29	114.6	203.2	-	-	-	-
				Persentase Rumah Layak Huni	82.86	84.02	85.18	-	-	-	-
				cakupan pelayanan pengelolaan sampah	0	0	20	-	-	-	-
2.5			Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30	40	50	-	-	-	-
2.6			Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	0	10	20	-	-	-	-
2.7			kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	0	10	20	-	-	-	-
3	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing	Rata rata lama sekolah		8.37	8.47	8.7	-	-	-	-
3.1			Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Rata rata lama sekolah	8.37	8.47	8.7	-	-	-	-
				Harapan lama sekolah	12.7	13	13.5	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
3.2			Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	0	100	100	-	-	-	-
3.3			Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0	10	20	-	-	-	-
				Indeks Pembangunan Olahraga	0	10	20	-	-	-	-
3.4			Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	Indeks pembangunan gender (IPD)	91.39	91.67	91.95	-	-	-	-
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.74	69.54	70.34	-	-	-	-
3.5			Minat Baca Masyarakat yang meningkat	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	25.1	30	35	-	-	-	-
3.6			Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	70	80	85	-	-	-	-
4	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup		69.46	69.76	70.06	-	-	-	-
4.1			Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	32	31	30	-	-	-	-
				Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	308	304	300	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
4.2			Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	75	90	100	-	-	-	-
4.3			Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76	70.06	-	-	-	-
4.4			Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	Laju pertumbuhan penduduk	2.01	1.96	1.91	-	-	-	-
5	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	LPE		5.26	6	6.2	-	-	-	-
			TPT		8.92	8.45	8.2	-	-	-	-
			Angka Kemiskinan		5.42	5.13	5	-	-	-	-
			Daya beli / Inflasi		2.94	3.7	4.2	-	-	-	-
5.1			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Nilai Investasi	52.3	56.4	60.8	-	-	-	-
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	82.16	83.62	85.22	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
5.2			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	3.05	3.7	3.95	-	-	-	-
5.3			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	4	4	-	-	-	-
				LPE Sektor Perdagangan	3.82	4.9	5.4	-	-	-	-
5.4			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD	7,05	5,3	5,6	-	-	-	-
5.5			Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,48	4,55	4,67	-	-	-	-
5.6			Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	82.4	89.2	90.6	-	-	-	-
5.7			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2.84	2.89	2.94	-	-	-	-
5.8			Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	NA	6	6	-	-	-	-
5.9			Usaha Kecil yang berdaya	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	NA	1	1	-	-	-	-
5.1			Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	8.24	4.49	3.89	-	-	-	-
				Index Gini	0,39	0.39	0.39	-	-	-	-
5.11			Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	95.2	97	98	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
5.12			Pengendalian, pengawasan dan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	12	12.5	13	-	-	-	-
5.13			Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri	Persentase Desa Mandiri	14	16.4	18.8	-	-	-	-
5.14			Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58.06	59.01	60.01	-	-	-	-
5.15			Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67	44.17	44.67	-	-	-	-
5.16			Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6	31.21	31.71	-	-	-	-

Tabel 5.3
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Banten (Setelah Perubahan)

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	SEKRETARIS DAERAH	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A		
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	OPD	
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	BADAN PENGHUBUNG	
			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DPRD	
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	2	3	3	4	4	4	INSPEKTORAT
				Capaian Kapabilitas APIP	Level	0	0	0	3	3	4	4	
			Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65	70	75	80	80	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	
			Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	50	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	%	0.00	0.00	0.00	70	75	80	80	
			Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10	10	15	20	25	30	30	BADAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	70	75	80	85	90	95	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	62.89	59.30	60.62	61.91	63.19	64.44	64.44	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75	75	80	80	85	85	SATPOL PP
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	68,46	70	74	76	78	80	80	BADAN KESBANGPOL
				Penanganan konflik masyarakat	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133	133	125	120	115	110	110	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO PEMERINTAHAN
				Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO HUKUM
			Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ORGANISASI
			Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO UMUM
			Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa	%	0.00	0.00	0.00	41.67	33.33	25	25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				tertinggal dan berkembang yang diberdayakan									
			Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08	89	89.55	90	90	90	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral	Nilai	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	70	80	85	90	95	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah		Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	50	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	50	60	70	80	85	90	90	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74.45	0.00	0.00	100	100	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83.00	0.00	0.00	93.5	95.9	100	100	
			Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	15,51	0.00	0.00	32.65	37.09	42.42	42.42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Luasan layanan irigasi	Ha	15.118,5	0.00	0.00	18.110,58	19.387,46	20.888,19	20.888,19	
				Persentase penyediaan prasarana air baku	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	0.00	0.00	87.5	90	92.5	92.5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375.29	114.6	203.2	274.6	333.3	375.29	375.29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase Rumah Layak Huni	%	82.86	84.02	85.18	86.34	87.5	88.66	88.66	
				cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	
			Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	0.00	0.00	0.00	75	88	100	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0.00	10	20	20	20	20	90	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	%	95.2	97	98	99	100	100	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	0.00	2.6	3	3.6	3.9	4	4	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	0.00	14.29	28.57	57.14	76.19	100.00	100.00	BIRO BINA INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
3.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	%	70.96	71,77	72,20	72,75	73,21	73,68	73,68	SERETARIS DAERAH
				Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,390	0,390	0,390	0,370	0,365	0,360	0,360	
				Kemiskinan	%	5.42	5,13	5,00	5,12	5,06	5,00	5,00	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.92	8,45	8,20	8,19	8,03	7,84	7,84	
			Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	12.7	13	13.5	14	14.5	15	15	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Rata rata lama sekolah	Tahun	8.37	8.47	8.7	8.9	9.1	9.3	9.3	
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91.39	91.67	91.95	92.23	92.51	92.79	92.79	
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71.13	72.9	74.67	76.45	78.22	80	80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57.21	58.77	60.33	61.88	63.44	65	65	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	0.00	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0.00	10	20	30	40	45	45	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
				Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0.00	10	20	30	40	45	45	
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.74	69.54	70.34	71.14	71.94	72.74	72.74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	0.00	0.00	0.00	72.73	77.27	100	100	
			Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	25.1	0.0	0.0	40	45	50	50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS SOSIAL
			Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	8.24	4.49	3.89	3.3	2.68	2.08	2.08	
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58.06	59.01	60.01	5.69	5.72	5.74	5.74	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	%	69.46	69.76	70.06	70.36	70.66	70.96	70.96	SEKRETARIS DAERAH

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	308	304	300	290	290	285	285	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	32	31	30	29	28	26	26	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	247	247	242	237	232	227	227	DINAS KESEHATAN
				Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jumlah	1,149	1,149	1,144	1,139.	1,134	1,129	1,129	
			Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75	90	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	0	60	65	70	75	80	80	DINAS KESEHATAN / RSUD
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	0	60	65	65	70	75	75	
			Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.4	0.00	0.00	2.21	2.23	2.26	2.26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIS DAERAH
5.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.26	6	6.2	6.4	6.7	7	7	
				Tingkat Inflasi	%	2.94	3.7	4.2	4	4	4	4	
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	0.00	0.00	0.00	6	6.2	6.4	6.4	ASISTEN PEMBANGUNAN

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	0.00	0.00	0.00	2.8	2.9	3	3	DAN PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	0.00	0.00	0.00	7	6	5	5	
			Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	0.00	0.00	0.00	49.00	51.30	53.90	53.90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82.16	85.09	85.22	85.47	85.72	85.97	85.97	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	3.05	3.7	3.95	4.2	4.45	4.7	4.7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	3.82	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	6.9	
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	7,05	0	0	5,8	6	6,2	6.2	DINAS PERTANIAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,48	0.00	0.00	4,72	4,80	4,93	4,93	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82.4	89.2	90.6	83.5	84.5	85.00	85.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	2.84	0.00	0.00	2.99	3.04	3.09	3.09	DINAS PARIWISATA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	NA	0.00	0.00	6	6	6	18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	NA	0.00	0.00	1	1	1	3	
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43.67	44.17	44.67	50.87	51.83	52.79	52.79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30.6	31.21	31.71	32.21	32.71	33.21	33.21	
			Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0.79	0.00	0.00	0.65	0.63	0.60	0.60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	0.00	0.00	0.00	43.75	45	46.29	46.29	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Tabel 5.5
Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional

RPJMD PROVINSI BANTEN 2017 -2022	RPJM NASIONAL 2015 -2019
VISI BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
MISI	MISI
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.